

## Penguatan Peran BUMDes dalam Mendorong Ketahanan Pangan di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone

Sahrain Bumulo<sup>1</sup>, Sainudin Latare<sup>2</sup>, Rahmat Ladiku<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email: sahrain@ung.ac.id; zainudin.latare@ung.ac.id; rahmatladiku28@gmail.com

### Abstract

*This community engagement program aims to strengthen the institutional role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a driving force for food security in Botutonuo Village, Bone Bolango Regency. Through participatory dialogue and educational sessions, villagers, farmers, village officials, and BUMDes managers were actively involved in identifying institutional challenges and formulating strategic solutions. The results show that although the village has regularly allocated capital to BUMDes, its management lacks structured and transparent business planning. The activity succeeded in raising collective awareness of the importance of accountable governance, institutional synergy, and the need for district-level policy support to ensure the sustainability of rural enterprises. In conclusion, this early-stage intervention has proven effective in stimulating institutional initiatives and fostering multi-stakeholder commitment to strengthening food-based rural economic development.*

**Keywords:** BUMDes; Food Security; Botutonuo Village; Community Empowerment.

### Abstrak

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendorong penguatan kelembagaan BUMDes sebagai motor penggerak ketahanan pangan di Desa Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango. Melalui kegiatan dialog dan edukasi partisipatif, masyarakat desa, petani, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi tantangan kelembagaan dan merumuskan solusi strategis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun penyertaan modal desa terhadap BUMDes telah dilakukan secara rutin, pengelolaannya belum berbasis pada perencanaan bisnis yang terstruktur dan transparan. Kegiatan ini berhasil membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya tata kelola yang akuntabel, sinergi kelembagaan desa, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat keberlanjutan usaha desa. Kesimpulannya, intervensi awal melalui kegiatan edukatif ini efektif dalam merangsang inisiatif kelembagaan dan menyatukan komitmen antar pemangku kepentingan untuk penguatan ekonomi desa berbasis pangan.*

**Kata Kunci:** BUMDes; ketahanan pangan; Desa Botutonuo; pemberdayaan Masyarakat.

© 2025 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

---

**Correspondence author:** Sahrain Bumulo, sahrain@ung.ac.id, Gorontalo, and Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam konteks desa, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pada kelembagaan ekonomi lokal yang mampu mendorong produktivitas dan kemandirian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas ekonomi desa memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program ketahanan pangan, baik melalui pengelolaan sumber daya lokal, distribusi hasil pertanian, maupun inovasi usaha yang berpihak pada petani dan masyarakat desa.

BUMDes adalah entitas usaha desa yang didirikan dengan memanfaatkan kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal untuk mengelola aset, memberikan layanan, serta mengembangkan unit-unit usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sumaryo et al., 2024). BUMDes merupakan lembaga ekonomi sekaligus sosial yang didirikan untuk mengelola potensi lokal dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Perannya tidak hanya menciptakan interaksi ekonomi antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan partisipasi warga dalam pembangunan (Engkus et al., 2020, Permatasari & Imaniar, 2022) . Secara umum, pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, memperbesar pendapatan asli desa (PADes), mengoptimalkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat, serta menjadi penggerak utama pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan (Iskandar et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMDes, termasuk mendorong keterlibatan

masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah desa dalam menggerakkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara efektif menjadi kunci dalam optimalisasi peran BUMDes di tingkat lokal (Rosanti et al., 2024).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan telah memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat, khususnya petani. Studi Rahman et al. (2024) menjelaskan bahwa peran BUMDes tidak hanya bersifat langsung melalui penyediaan layanan agribisnis, tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan akses modal bagi petani. Selain itu, studi Halawa et al. (2024) mengungkapkan bahwa BUMDes berperan sebagai fasilitator utama dalam usaha ketahanan pangan. Melalui penyediaan pelatihan, modal, bibit unggul, dan pupuk berkualitas, BUMDes mendorong peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat desa.

Penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes menjadi elemen penting dalam mendorong ketahanan pangan, penerapan teknologi pertanian berkelanjutan, serta memperkuat posisi petani dalam sistem ekonomi desa (Sihombing, 2023). Keberhasilan ketahanan pangan desa juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif petani serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat perdesaan. Dalam kerangka tersebut, kelembagaan desa mencakup beragam bentuk, mulai dari tata kelola pemerintahan lokal, organisasi kemasyarakatan, kerja sama ekonomi, hingga aktivitas usaha swasta terutama di sektor agribisnis yang memiliki potensi untuk terkoneksi dengan pasar di tingkat lokal, regional, maupun global (Elizabeth, 2019).

Melihat pentingnya peran kelembagaan ekonomi lokal dalam mendorong ketahanan pangan, perhatian perlu diarahkan pada konteks lokal yang menghadapi tantangan riil di lapangan. Di Desa Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango, BUMDes memiliki potensi besar untuk mengambil peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Meskipun desa ini dikaruniai kekayaan alam berupa lahan pertanian dan sumber daya pesisir, pengelolaan sektor pangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas kelembagaan BUMDes, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsinya, serta lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan pelaku usaha tani.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan intervensi awal untuk memperkuat kelembagaan BUMDes dan membangun kesadaran kolektif masyarakat desa. Kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai upaya untuk membuka ruang dialog, memberikan edukasi, dan mendorong perumusan peran konkret BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi strategis BUMDes di sektor pangan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menjamin ketersediaan, distribusi, dan akses pangan di tingkat desa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini merupakan implementasi program KKN-MBKM Jurusan

Sosiologi dengan tema "Penguatan Peran BUMDes dalam Mendorong Ketahanan Pangan di Desa Botutonuo." Peserta kegiatan terdiri atas masyarakat umum, petani cabai, perangkat Pemerintah Desa, pengelola BUMDes (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), serta mahasiswa KKN-MBKM. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango, Bapak Ronny Hunawa, S.E., yang hadir bersama Dosen Pendamping Lapangan dari Jurusan Sosiologi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi dalam tiga tahapan utama, yaitu: (1) observasi dan identifikasi masalah; (2) pelaksanaan kegiatan inti; dan (3) evaluasi serta pelaporan. Tahapan pertama dilakukan melalui observasi lapangan dan komunikasi langsung dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan petani lokal untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan utama dalam pengelolaan sektor pangan desa. Hasil observasi menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan BUMDes serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi strategis lembaga tersebut dalam mendukung ketahanan pangan.

Tahapan kedua merupakan kegiatan inti yang dilakukan melalui edukasi partisipatif, pemaparan materi, diskusi terbuka, serta sesi tanya jawab antara narasumber, peserta, dan tim pelaksana. Materi disampaikan oleh perwakilan Dinas PMD serta dosen pendamping, yang membahas kebijakan pembangunan desa berbasis potensi lokal, serta pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa yang berpihak pada petani dan masyarakat. Partisipasi aktif peserta menjadi elemen penting

dalam menggali gagasan dan menyusun pemahaman bersama terkait peran konkret BUMDes dalam sektor pangan.

Tahapan ketiga mencakup evaluasi dan pelaporan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara partisipatif melalui diskusi reflektif bersama peserta untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman dan respons terhadap materi. Selain itu, mahasiswa KKN-MBKM juga melakukan monitoring pasca kegiatan dengan mengunjungi pengelola BUMDes guna mencatat progres dan respons awal yang muncul setelah kegiatan berlangsung. Monitoring ini sekaligus menjadi media informal untuk memastikan adanya tindak lanjut internal di tingkat kelembagaan. Seluruh proses kegiatan, hasil diskusi, dan temuan lapangan didokumentasikan dalam laporan pengabdian sebagai pijakan untuk perencanaan program keberlanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada 1 Mei 2025 di Desa Bototonuo berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari seluruh peserta, baik dari unsur masyarakat, petani, pengelola BUMDes, maupun pemerintah desa. Keterlibatan peserta terlihat aktif dalam sesi dialog, terutama saat membahas tantangan yang dihadapi BUMDes dalam mengelola potensi pangan desa. Respons yang ditunjukkan peserta selama kegiatan mencerminkan antusiasme dan minat untuk memahami lebih dalam peran strategis BUMDes dalam sektor pangan.

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap fungsi kelembagaan BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan. Peserta, khususnya pengelola BUMDes

dan petani, mulai memahami pentingnya sinergi kelembagaan antara BUMDes, pemerintah desa, dan kelompok tani. Dalam diskusi, muncul beberapa gagasan konkret, seperti penguatan unit usaha agribisnis di bawah BUMDes, pembentukan kelompok tani berbasis komoditas unggulan, serta pengelolaan hasil pertanian secara kolektif melalui skema bisnis desa.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pengelolaan BUMDes yang Berkelanjutan

Gagasan-gagasan tersebut muncul secara organik dari pengalaman langsung para peserta dalam menghadapi tantangan pertanian di tingkat desa. Seorang petani mengusulkan agar BUMDes membentuk unit agribisnis yang dapat menjadi pusat distribusi sarana produksi pertanian (saprotan), mengingat seringnya terjadi kelangkaan pupuk dan bibit di musim tanam. Usulan ini mendapat dukungan dari peserta lain yang melihat peluang tersebut sebagai bagian dari solusi konkret terhadap kenaikan biaya produksi. Sementara itu, beberapa peserta dari unsur tokoh masyarakat menyarankan agar dibentuk kelompok tani berbasis komoditas unggulan lokal, misalnya cabai, guna memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir.

Pengelolaan hasil pertanian secara kolektif juga menjadi topik yang disorot, terutama dalam hal penyimpanan, pengemasan, dan pemasaran. Salah satu pengelola BUMDes bahkan menyampaikan

inisiatif untuk membangun lumbung pangan desa sebagai bagian dari unit bisnis kolektif yang dikelola bersama kelompok tani. Seluruh usulan ini berkembang dari pengalaman empirik peserta, serta difasilitasi secara partisipatif selama sesi dialog terbuka, yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara kritis dan konstruktif.

Lebih lanjut, beberapa peserta juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani agar mampu menjalankan fungsi produksi dan distribusi secara mandiri. Mereka mengusulkan agar BUMDes tidak hanya berperan sebagai penyedia sarana produksi, tetapi juga sebagai lembaga pendamping yang memfasilitasi pelatihan teknis budidaya, pengelolaan keuangan kelompok, dan strategi pemasaran



Gambar 2. Jenis Usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes

*Sumber:* Materi PPT “Peran BUMDes dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Desa” Narasumber Ronny Hunawa, S.E. (1 Mei 2025).

Pada Gambar 2, narasumber memaparkan beragam jenis unit usaha yang dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, termasuk oleh BUMDes di Desa Botutonuo, namun perlu disesuaikan dengan potensi usaha yang ada di desa ini. Terdapat tujuh jenis usaha yang digambarkan, yaitu: (1) usaha sosial, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat desa; (2)

usaha sewa, seperti penyewaan alat-alat yang dimiliki BUMDes; (3) usaha dagang, berupa kegiatan jual beli barang kebutuhan masyarakat; (4) usaha perantara, yang berfungsi sebagai mediator antara produsen dan konsumen; (5) usaha bersama, yakni bentuk kerja sama antar individu atau kelompok desa; (6) usaha kontraktor, yang melibatkan BUMDes dalam kegiatan konstruksi atau pengadaan jasa; dan (7) usaha keuangan, yang memberikan layanan keuangan skala mikro kepada masyarakat desa.

Diversifikasi usaha ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan potensi lokal desa. Pendekatan ini mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat daya saing lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara kolektif dan berkelanjutan.

Diskusi juga mengungkap berbagai aspirasi dan persoalan yang selama ini dihadapi pengelola BUMDes. Salah satu pengurus mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan yang tepat serta jenis program produktif yang ideal dikembangkan sesuai dengan potensi desa. Selain itu, muncul pula keluhan mengenai tidak transparannya program dan kegiatan pada masa kepengurusan sebelumnya, di mana meskipun anggaran yang dikururkan cukup besar, tidak ada keberlanjutan program, sehingga berdampak pada keterbatasan anggaran pada kepengurusan saat ini.

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola dan rendahnya kapasitas kelembagaan BUMDes dalam menyusun perencanaan usaha yang berkelanjutan. Minimnya dokumentasi program dan pelaporan keuangan yang tidak transparan menjadi

penyebab utama tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.



Gambar 3. Penyertaan Modal Desa ke BUMDes tahun 2017-2023

*Sumber:* Materi PPT “Peran BUMDes dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Desa” Narasumber Ronny Hunawa, S.E. (1 Mei 2025).

Pada Gambar 3, narasumber memaparkan data terkait akumulasi penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Botutonuo kepada BUMDes Sumber Usaha sejak tahun 2017. Data yang ditampilkan mencakup tiga tahun penyertaan modal, yakni sebesar Rp29.501.600 pada tahun 2017, meningkat signifikan menjadi Rp214.735.530 pada tahun 2021, dan kembali diberikan sebesar Rp25.025.444 pada tahun 2023. Total keseluruhan penyertaan modal selama kurun waktu tersebut berjumlah Rp269.262.574.

Besarnya nilai penyertaan modal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Desa dalam memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ketersediaan modal yang memadai diharapkan mampu mendorong pengembangan unit usaha BUMDes secara berkelanjutan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Namun, berdasarkan pengakuan peserta diskusi, pengelolaan anggaran pada periode sebelumnya tidak berjalan secara transparan dan tidak didukung oleh rencana usaha yang matang.

Akibatnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak berkelanjutan, serta tidak meninggalkan dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat desa.

Ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan serta lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan tidak adanya akumulasi aset yang dapat dimanfaatkan oleh kepengurusan BUMDes saat ini. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes serta minimnya modal operasional yang tersedia untuk memulai program baru. Oleh karena itu, narasi mengenai penyertaan modal sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3 menjadi dasar penting bagi pengelolaan BUMDes ke depan agar lebih akuntabel, partisipatif, dan berbasis perencanaan strategis yang berkelanjutan.

Di sisi lain, petani yang hadir dalam kegiatan ini menyuarakan persoalan terkait kelangkaan bibit, pupuk, dan obat-obatan bersubsidi yang menyebabkan biaya produksi meningkat tajam. Para petani berharap BUMDes dapat menjadi fasilitator dalam membantu pengadaan atau distribusi sarana produksi pertanian tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Seluruh diskusi berkembang dengan sangat aktif, diwarnai pertukaran ide dan pengalaman yang membuka ruang refleksi bersama mengenai arah penguatan ekonomi desa yang berbasis pada ketahanan pangan.

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan, ditemukan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Botutonuo masih bersifat administratif dan belum berbasis rencana bisnis jangka menengah yang terstruktur. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pengalaman dalam manajemen usaha, serta minimnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama dalam mengembangkan unit usaha yang

berkelanjutan. Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar-stakeholder desa dalam menyusun agenda prioritas yang berbasis potensi pangan lokal.

Peserta kegiatan juga menyuarakan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang lebih proaktif, akses pendampingan, dan kemudahan perizinan usaha. Beberapa peserta menilai bahwa tanpa intervensi kebijakan yang berpihak kepada desa, BUMDes akan sulit berkembang secara mandiri. Oleh karena itu, muncul dorongan agar pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, termasuk dalam hal pembinaan, alokasi dana khusus, dan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga.



Gambar 4. Foto Bersama dan Penyerahan Sertifikat Kepada Narasumber

Secara umum, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif di antara para pelaku desa terhadap pentingnya peran BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Antusiasme dan keterbukaan peserta dalam menyampaikan persoalan serta menyusun usulan menjadi indikator bahwa ruang-ruang edukatif seperti ini sangat dibutuhkan sebagai media konsolidasi gagasan dan arah pembangunan berbasis potensi desa.



Gambar 5. Diskusi dengan berbagai pihak pasca kegiatan workshop

Selain hasil selama kegiatan, proses monitoring pasca kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-MBKM menunjukkan adanya inisiatif awal dari pengelola BUMDes untuk merancang program kerja jangka pendek yang berfokus pada sektor pangan, termasuk pendataan lahan dan komoditas pertanian potensial. Diskusi lanjutan dengan pemerintah desa juga menghasilkan komitmen untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian ini ke dalam perencanaan pembangunan desa pada tahun berikutnya.

## **Pembahasan**

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes sebagai pendorong ketahanan pangan di tingkat desa belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun Desa Botutonuo memiliki potensi alam yang mendukung, kelembagaan BUMDes masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Hal ini sejalan dengan temuan Sihombing (2023) yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci dalam keberhasilan adopsi inovasi di sektor pertanian, termasuk melalui dukungan struktural terhadap lembaga desa seperti BUMDes.

Masalah utama yang muncul dalam diskusi bersama peserta adalah lemahnya kapasitas kelembagaan, baik dari sisi tata kelola maupun sumber daya manusia. Minimnya akuntabilitas pada periode kepengurusan sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam Gambar 3, memperlihatkan bahwa penyertaan modal desa tidak diiringi dengan manajemen yang transparan dan terencana. Hal ini sejalan dengan temuan Elizabeth (2019), yang menyebutkan bahwa ketiadaan perencanaan berkelanjutan dan lemahnya fungsi kontrol sosial dalam kelembagaan desa berdampak pada kegagalan program yang telah dikurirkan. Oleh karena itu, praktik tata kelola BUMDes yang tidak akuntabel dapat menciptakan lingkaran ketidakpercayaan dan memperburuk posisi kelembagaan itu sendiri dalam struktur ekonomi desa.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes bukan hanya berdampak pada menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi desa, tetapi juga menurunkan potensi mobilisasi sumber daya lokal. Lingkaran sebab-akibat ini terlihat ketika modal usaha yang tersedia tidak diiringi dengan antusiasme masyarakat untuk mendukung atau mengakses layanan BUMDes, yang pada gilirannya memperlemah posisi tawar BUMDes dalam menjalin kemitraan atau mengembangkan unit usaha baru.

Ketidakhadiran sistem pelaporan yang transparan juga menciptakan ruang spekulasi dan ketegangan sosial, terutama di kalangan petani dan pemuda desa yang seharusnya menjadi aktor utama dalam transformasi ekonomi desa. Dengan kata lain, lemahnya tata kelola bukan hanya masalah administratif, tetapi berimplikasi langsung pada stagnasi pembangunan ekonomi lokal.

Selain kelembagaan internal, keterbatasan akses terhadap input pertanian seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan bersubsidi juga menjadi persoalan yang disuarakan oleh petani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa BUMDes belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai fasilitator distribusi sarana produksi pertanian. Padahal, dalam konteks ketahanan pangan, BUMDes memiliki potensi untuk menjadi perantara strategis antara petani dan sumber daya ekonomi, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini memperkuat pendapat Rosanti et al. (2024) yang menekankan bahwa pemerintah desa dan BUMDes harus membangun model kolaboratif yang dapat menjawab kebutuhan riil petani di lapangan.

Diskusi yang berkembang juga menunjukkan adanya harapan besar dari masyarakat terhadap peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam hal regulasi dan dukungan pendampingan. Peserta menyuarakan pentingnya akses terhadap pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan usaha desa. Aspirasi ini senada dengan pandangan Elizabeth (2019) yang menyatakan bahwa struktur kelembagaan yang terhubung secara vertikal dari desa ke kabupaten merupakan syarat penting bagi desa untuk bertumbuh dalam kerangka pembangunan partisipatif.

Selain berperan dalam penguatan sektor pertanian, BUMDes juga memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor ekonomi alternatif seperti pariwisata desa. Pemaparan narasumber dalam Gambar 2 menekankan pentingnya diversifikasi usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah, dan Desa Botutonuo memiliki keunggulan geografis yang mendukung pengembangan dua sektor sekaligus yakni pertanian dan pariwisata pesisir. Pendekatan integratif antara sektor

pertanian dan pariwisata desa dapat menciptakan mata rantai ekonomi lokal yang lebih luas, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Namun, hal ini menuntut adanya inovasi kelembagaan, kemampuan manajerial, serta jejaring pasar yang kuat agar usaha BUMDes tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terealisasi dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam membangun kapasitas masyarakat desa. Peran mahasiswa KKN-MBKM dan dosen pendamping bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pemicu terbentuknya ruang dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes. Proses diskusi, pendampingan, hingga monitoring pasca kegiatan memberikan contoh nyata bagaimana intervensi berbasis pengetahuan lokal dan partisipatif dapat memecahkan persoalan sekaligus merumuskan solusi bersama. Hal ini membuka peluang untuk mereplikasi model kegiatan serupa di desa lain dengan pendekatan kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah.

Kontribusi unik dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan dialogis dan partisipatif yang mengutamakan pengalaman lokal sebagai basis pembelajaran bersama. Tidak seperti program pelatihan formal yang bersifat top-down, kegiatan ini membuka ruang interaksi horizontal antar pelaku desa untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi yang kontekstual. Melalui fasilitasi mahasiswa KKN-MBKM dan dosen pendamping, forum ini mampu menyatukan berbagai perspektif dari pengelola BUMDes, petani, hingga perangkat desa dalam satu meja diskusi yang egaliter. Model pendekatan ini mendorong terbangunnya rasa memiliki terhadap program yang

dihasilkan, sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi karena berasal dari kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Selain itu, keberlanjutan program BUMDes juga sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang terus-menerus, pengelola BUMDes akan lebih siap dalam menjalankan peran mereka, baik dalam hal perencanaan, pengelolaan dana, maupun pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Selain itu, pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan program tersebut. Tanpa adanya kapasitas yang memadai, usaha yang dijalankan oleh BUMDes cenderung akan terhambat, bahkan berisiko gagal, meskipun memiliki potensi yang besar.

Di sisi lain, penguatan sektor pariwisata desa sebagai bagian dari diversifikasi usaha BUMDes memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal promosi dan aksesibilitas. Desa Botutonuo dengan keindahan alam pesisirnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. Namun, untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan yang lebih baik, fasilitas wisata yang memadai, dan promosi yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak terkait, baik dari sektor swasta, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata desa yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat.

Secara reflektif, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoretis, tetapi juga membuka ruang dialog kritis yang melibatkan semua pihak. Proses penguatan kapasitas kelembagaan

melalui kegiatan edukatif seperti ini terbukti mampu membangun kesadaran kolektif dan menciptakan komitmen bersama terhadap arah pembangunan yang lebih partisipatif. Temuan ini memperkuat posisi kegiatan pengabdian sebagai media intervensi awal dalam merumuskan arah strategis penguatan BUMDes berbasis ketahanan pangan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Botutonuo telah memberikan kontribusi penting dalam mendorong kesadaran kelembagaan dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan desa. Melalui sesi dialog dan diskusi interaktif, berbagai persoalan yang menghambat optimalisasi fungsi BUMDes berhasil diidentifikasi, mulai dari lemahnya tata kelola kelembagaan, kurangnya transparansi pengelolaan dana, minimnya sinergi antar-pemangku kepentingan desa, hingga keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan manajemen usaha, perencanaan bisnis berbasis potensi lokal, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok tani. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi, pendampingan teknis, dan alokasi subsidi menjadi faktor penting untuk mendorong keberlanjutan program BUMDes di sektor pangan.

Ke depan, kegiatan ini merekomendasikan tindak lanjut yang lebih terstruktur dan terukur, antara lain: (1) pelaksanaan pelatihan lanjutan bagi pengelola BUMDes dan kelompok tani dalam tiga bulan ke depan, difasilitasi oleh mitra perguruan tinggi dan dinas teknis terkait; (2) pendampingan penyusunan rencana bisnis unit agribisnis desa berbasis

komoditas unggulan, dengan target implementasi awal pada triwulan pertama tahun berikutnya; dan (3) integrasi hasil kegiatan pengabdian ini ke dalam RKPDes tahun 2026 melalui forum musyawarah desa yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan monitoring kelembagaan secara berkala setiap enam bulan untuk menilai kemajuan tata kelola dan efektivitas program BUMDes.

Dengan langkah-langkah ini, transformasi kelembagaan BUMDes menuju lembaga ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara nyata dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan pendanaan dan pendampingan yang telah diberikan, sehingga program pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Botutonuo yang telah menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Sinergi yang terjalin dengan dukungan aktif dari seluruh pihak terkait sangat berperan penting dalam keberhasilan program ini. Semoga output dari kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

## **REFERENCES**

- Elizabeth, R. G. (2019). Peningkatan partisipasi petani, pemberdayaan kelembagaan dan kearifan lokal mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 4(2), 48–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/agricore.v4i2.26509>

- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Halawa, F., Lase, F., Harefa, H. O. N., & Harefa, A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan di Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6), 717–723. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15059>
- Iskandar, J., Engkus, E., Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1-11. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i2.1>
- Permatasari, S. J., & Imaniar, D. (2022). Optimalisasi peran BUMDes dalam meningkatkan kemandirian desa (Studi pada BUMDes Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora (J-PSH)*, 13(1), 9–23. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i1.52074>
- Rahman, N., Yuniasih, A. W., & Nurlaela, S. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan perekonomian masyarakat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(2), 140–151. <https://doi.org/10.51852/jpp.v19i2.678>
- Rosanti, N., Murniati, K., Syarief, Y. A., & Nugraha, A. (2024). Optimalisasi peran BUMDes dalam peningkatan kinerja pemasaran produk UMKM di Pekon Sri Menanti Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(2), 163–174. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v3i2.9720>
- Sihombing, Y. (2023). Inovasi kelembagaan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 83–90. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707>
- Sumaryo, S., Haryono, D., Silviyanti, S., & Syafani, T. S. (2024). Penguatan dan pengembangan BUMDes melalui potensi ekonomi lokal di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(2), 93–103. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v3i2.9023>